

Rahmat Sawalman
Analisis Legislatif Ahli Pertama
rahmat.sawalman@dpr.go.id

Sri Nurhayati Qodriyatun
Analisis Legislatif Ahli Madya
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada temuan beras impor yang terkontaminasi kutu di beberapa gudang Perum Bulog (Bulog). Temuan ini pertama kali diungkap oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian pada 11 Maret 2025. Temuan ini berasal dari kunjungan kerja yang dilakukan saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke gudang Bulog di Yogyakarta, di mana ditemukan sisa beras impor dari tahun sebelumnya yang telah terkontaminasi kutu dan tidak layak konsumsi. Beras tersebut merupakan bagian dari kebijakan impor yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ketahanan stok pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa jumlah beras impor yang terkontaminasi kutu diperkirakan mencapai 100.000 hingga 300.000 ton dari total cadangan beras nasional sekitar 2 juta ton yang tersimpan di berbagai gudang Bulog di Indonesia. Kontaminasi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dengan distribusi dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional. Penyebab utama beras menjadi berkutu diduga akibat kondisi penyimpanan yang kurang optimal. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa kelembapan udara yang tinggi dan minimnya sirkulasi udara di gudang Bulog menjadi penyebab utama memburuknya kualitas beras. Faktor ini menunjukkan adanya tantangan dalam sistem penyimpanan pangan di Indonesia, terutama dalam menjaga kualitas beras impor dalam jangka waktu yang lama.

Temuan beras berkutu di gudang Bulog menimbulkan berbagai reaksi, baik dari masyarakat maupun dari lembaga pemerintah. Kekhawatiran utama adalah kemungkinan beras tersebut tetap didistribusikan ke masyarakat, terutama dalam program-program bantuan sosial atau subsidi pangan. Namun, pemerintah segera memberikan klarifikasi bahwa beras yang terkontaminasi tidak akan digunakan dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun untuk bantuan sosial demi menjaga keamanan pangan masyarakat.

Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan beras yang beredar di masyarakat dalam kondisi layak konsumsi. Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa beras berkutu tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti pakan ternak, guna menghindari pemborosan dan tetap memberikan manfaat secara ekonomi. Meskipun demikian, temuan ini memperlihatkan bahwa perlu ada evaluasi terhadap sistem pengelolaan stok beras nasional, khususnya terkait prosedur penyimpanan dan mekanisme pemantauan kualitas. Beberapa pihak menilai bahwa kejadian ini mencerminkan kurangnya pengawasan dan kontrol kualitas yang ketat terhadap beras impor sejak awal masuk hingga disimpan dalam gudang Bulog.

Menanggapi isu ini, pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan terhadap beras impor yang masuk ke Indonesia. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memastikan perbaikan dalam sistem penyimpanan, termasuk peningkatan ventilasi dan kontrol suhu di dalam gudang.

Selain itu, Kementerian Pertanian dan Bulog juga akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap stok beras yang tersimpan di seluruh gudang, guna memastikan tidak ada beras berketu yang terdistribusi kepada masyarakat. Pemerintah juga berencana menerapkan metode pengelolaan stok beras yang lebih ketat, termasuk pemantauan secara berkala untuk mendeteksi potensi penurunan kualitas beras sebelum terjadi kontaminasi.

Kasus beras berketu di gudang Bulog memberikan beberapa pelajaran penting. *Pertama*, kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan penyimpanan dan distribusi pangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Praktik penyimpanan yang baik dan prosedur pengawasan yang ketat sangat penting untuk menjaga kualitas pangan. *Kedua*, keterbukaan informasi mengenai kondisi produk pangan sangat penting. Publik berhak mengetahui mutu pangan yang diberikan kepada mereka, sehingga transparansi dalam pengawasan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. *Ketiga*, standar kualitas yang ketat dalam pengadaan dan penyimpanan beras serta bahan pangan lainnya sangat diperlukan. *Keempat*, pengawasan yang efektif dari pemerintah dan instansi terkait sangat penting untuk memastikan keamanan pangan. Ini juga mencakup kegiatan audit dan pemeriksaan berkala. *Kelima*, masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih peduli terhadap isu kualitas pangan. *Keenam*, respons terhadap situasi darurat harus cepat dan efisien, termasuk rencana darurat untuk penanganan produk yang tercemar dan komunikasi yang jelas kepada publik.

Atensi DPR

Menghadapi isu beras berketu di gudang Bulog, Komisi IV DPR RI memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pangan di Indonesia. *Pertama*, DPR harus mendorong perbaikan sistem manajemen dan pengawasan produk pangan, dengan penegasan pada regulasi dan standar penyimpanan yang ketat. *Kedua*, mendorong pemerintah melakukan audit berkala terhadap penyimpanan dan distribusi beras guna memastikan kualitas dan keamanan produk yang disalurkan kepada masyarakat. Hasil audit tersebut sebaiknya dipublikasikan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. *Ketiga*, mendorong pemerintah mengedukasi masyarakat mengenai cara mengenali pangan berkualitas. Edukasi akan memberdayakan masyarakat untuk memilih produk yang aman. Melalui langkah-langkah ini diharapkan Komisi IV DPR RI dapat berperan aktif dalam menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih baik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pangan di Indonesia.

Sumber

antaranews.com, 12 Maret 2025;
cnnindonesia.com, 11 Maret 2025;
detik.com, 12 Maret 2025;
kompas.com, 12 dan 13 Maret 2025;

kontan.co.id, 11 Maret 2025;
metrotvnews.com, 12 Maret 2025;
tempo.co, 13 dan 14 Maret 2025.



EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making